

Kolaborasi Antar Aktor dalam Pengembangan Objek Wisata Terbuka Hijau di Surakarta

Arifah Nurma Zulaida¹, Yosafat Hermawan Trinugraha²

^{1,2}Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret

^{1,2}Email : arifahnurma88@student.uns.ac.id , yosafathermawan@staff.uns.ac.id

Diterima	25	Mei	2025
Disetujui	22	Juni	2025
Dipublish	30	Juni	2025

Abstract

The increasing need for green open spaces (RTH) in urban areas is in line with the development of cultural and nature-based tourist destinations. The revitalization of Balekambang Park into a green open tourist attraction in Surakarta City is a real example of collaboration between actors in developing tourist attractions. This study aims to analyze how the collaboration process between actors involved in the development of Balekambang Park after revitalization with a case study approach to understand the dynamics of the collaboration that was formed. Data collection was carried out through in-depth interviews, observations, and literature studies, then analyzed by triangulation by comparing data obtained from various sources of information. Analyzed using Talcott Parsons' Structural Functionalism theory with the AGIL scheme. The selection of informants was carried out by purposive sampling involving UPTD Tourism Areas, art studios, MSMEs, and the Community. The results of the study showed that there was collaboration between the government (Culture and Tourism Office, Ministry of PUPR) art studios, MSMEs, and the community. The results of the collaboration are reflected in the adaptation stage, namely by socializing and communicating the revitalization project and how to adapt to existing changes, the achievement of goals is reflected in efforts to increase tourists and PAD, integration is carried out by holding regular coordination forums with related actors, and latency is shown by the occurrence of good communication between actors.

Keywords: *Colaboration, Tourism Development, Balekambang Park, Actor*

Abstrak

Meningkatnya kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan sejalan dengan pengembangan destinasi wisata berbasis budaya dan alam. Revitalisasi Taman Balekambang menjadi objek wisata terbuka hijau di Kota Surakarta merupakan contoh nyata kolaborasi antar aktor dalam pengembangan objek wisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses kolaborasi antar aktor yang terlibat dalam pengembangan Taman Balekambang pasca revitalisasi dengan pendekatan studi kasus untuk memahami dinamika kolaborasi yang terbentuk. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis secara triangulasi dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber informasi. Dianalisis menggunakan teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons dengan skema AGIL. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan melibatkan UPTD Kawasan Pariwisata, sanggar seni, UMKM, dan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan adanya kolaborasi antara pemerintah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian PUPR) sanggar seni, UMKM, dan masyarakat. Hasil kerjasama tercermin pada tahap adaptasi yaitu dengan melakukan sosialisasi dan komunikasi mengenai proyek revitalisasi dan cara adaptasi terhadap perubahan yang ada, pencapaian tujuan tercermin dari upaya peningkatan wisatawan dan PAD, integrasi dilakukan dengan menggelar forum koordinasi



secara berkala dengan pelaku terkait, dan latensi ditunjukkan dengan terjadinya komunikasi yang baik antar pelaku.

Kata kunci: Kolaborasi, Pengembangan Pariwisata, Taman Balekambang, Aktor

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang pariwisata, dijelaskan bahwa pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas maupun layanan yang disediakan oleh masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pengusaha. Pariwisata merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertujuan untuk mengisi waktu senggang, menempati suatu lokasi, bersantai dan berkegiatan yang mampu memberi dampak positif bagi seseorang, baik secara fisik maupun mental menurut (Jordan, 1980; Pearce, 2012) dalam (Saniati et al., 2022). Hal itu menyebabkan kegiatan pariwisata menjadi salah satu kebutuhan seseorang.

Kota Surakarta merupakan satu dari sekian banyak kota di Indonesia yang memiliki potensi wisata dan mampu dimanfaatkan serta dikembangkan. Kota Surakarta kaya akan budaya, sejarah, kuliner, dan perbelanjaan, tetapi belum semuanya dikelola secara maksimal menjadi objek wisata (Amelia et al., 2022). Potensi yang beraneka ragam tersebut menunjukkan bahwa sektor Pariwisata di Kota Surakarta berpotensi cukup tinggi untuk dikembangkan lebih lanjut.

Salah satu lokasi wisata yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah taman kota. Kota Surakarta sendiri memiliki beberapa taman kota yang tersebar di beberapa wilayah. Taman kota dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berekreasi ataupun sebagai tempat melepas penat dengan bersantai. Taman kota menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) yang berfungsi sebagai paru-paru kota yang mampu menyerap karbondioksida hasil dari

pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor maupun industri (Salatalohy et al., 2023). Berdasarkan data BPS Kota Surakarta per bulan Maret tahun 2024, ketersediaan RTH publik seluas 466,72 Ha atau 9,98% dari luas wilayah Kota Surakarta. Tentunya belum mencapai minimum penyediaan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah sesuai dengan peraturan UU Nomor 26 Tahun 2007.

Taman Balekambang merupakan salah satu taman kota yang ada di Surakarta dan menjadi RTH (Ruang Terbuka Hijau) sekaligus destinasi wisata. Kawasan Balekambang awalnya adalah milik keluarga Mangkunegaran, kemudian setelah kemerdekaan Indonesia beralih kepemilikan kepada Pemerintah Kota Surakarta (Wijayanti & Rani, 2022). Taman ini sudah berdiri sejak tahun 1961, merupakan hadiah yang diberikan oleh Soerjosoeparto yang bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPA) Mangkunegoro VII kepada kedua putrinya yang bernama Partini dan Partinah. Sebelum beralih kepemilikan menjadi milik Pemerintah Kota Surakarta, kondisinya dapat dikatakan tidak terawat. Perhatian terhadap objek wisata ini baru dimulai pada tahun 2007 ketika masa pemerintahan Pak Jokowi dengan merelokasi sekitar dua puluh delapan penduduk yang menetap di kawasan Balekambang ke Kadipiro yang bernama Kampung Seniman. Kawasan Balekambang mulai difungsikan sebagai taman dan melalui beberapa kali revitalisasi penataan *landscape* sejak 2007 sampai yang terakhir pada tahun 2022 dan baru dibuka kembali secara resmi pada tahun 2024. Pasca revitalisasi, Taman Balekambang mulai beralih fungsi tidak hanya menjadi taman kota, namun juga menjadi objek wisata yang mengusung konsep *botanical garden* menggabungkan keindahan



alam dengan kearifan lokal (Ashartono et al., 2024).

Sebuah destinasi wisata pasca direvitalisasi tentunya membutuhkan pengembangan, tujuannya memulihkan kondisi objek wisata agar dapat difungsikan kembali secara normal dan diharapkan mampu menarik lebih banyak pengunjung. Pengembangan ini tidak bertujuan merubah secara keseluruhan, namun bagaimana pengelolaan dapat dilakukan untuk memanfaatkan serta melestarikan potensi yang ada di dalamnya menjadi sebuah daya tarik wisata (Purnawati, 2021). Dalam melakukan pengembangan tentunya sebuah objek wisata membutuhkan adanya kolaborasi secara aktif dari berbagai aktor atau stakeholder (Asurah & Wibawani, 2023).

Dalam proses pengembangannya, promosi yang dilakukan Taman Balekambang belum berjalan dengan maksimal, tentunya hal tersebut dikhawatirkan dapat berpengaruh pada ketidakstabilan kuantitas pengunjung dan perekonomian UMKM yang berjualan di dalam kawasan taman. Berdasarkan observasi yang dilakukan melalui sosial media *instagram* Taman Balekambang, peneliti menemukan bahwa promosi yang dilakukan masih berfokus pada pertunjukan Sendratari Ramayana dan kurang mengekspos potensi secara keseluruhan, seperti pedagang UMKM yang kurang terpromosikan ditambah letak bazar tersebut juga jauh dari pintu masuk dan tertutupi oleh bangunan teater. Selain itu dari pemanfaatan lahan juga masih belum optimal karena terdapat bagian yang belum selesai pembangunannya. Namun dari segi kebutuhan masyarakat, UPTD Kawasan Wisata juga memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan menambah beberapa fasilitas bermain secara berkala.

Tujuan dari pengembangan Taman Balekambang ini adalah utamanya untuk meningkatkan jumlah pengunjung yang

berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Konsistensi jumlah pengunjung memegang peranan penting dalam mengukur keberhasilan suatu objek wisata (Veriyani et al., 2023). Yang menjadi pembeda dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya atau *gap research* dalam penelitian ini adalah pada penelitian yang dilakukan oleh (Sitorus, 2020) kolaborasi aktor yang terlibat salah satunya adalah pihak swasta, tetapi masih mengabaikan kepemilikan dari destinasi tersebut. Taman Balekambang belum melakukan kolaborasi dengan pihak swasta, tetapi sudah dicanangkan bahwa nantinya pasti akan ada pihak swasta yang dilibatkan dalam kolaborasi.

Selain itu pada penelitian yang dilakukan oleh (Ashartono et al., 2024) menjelaskan mengenai peningkatan kualitas Taman Balekambang setelah revitalisasi dengan konsep kebun botani menuju taman ekologi budaya Jawa yang memadukan alam dan budaya, namun belum dijelaskan mengenai bagaimana proses pengembangannya dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses kolaborasi yang dilakukan oleh aktor-aktor terkait dalam pengembangan Taman Balekambang pasca revitalisasi menjadi objek wisata terbuka hijau, sehingga penelitian yang dihasilkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang akan mengembangkan objek wisata mengenai bentuk kolaborasi yang dapat diterapkan. Peneliti menggunakan teori sosiologi sebagai alat analisis kajian sehingga hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bersifat spekulatif.

Metode Penelitian

Metode Penelitian kualitatif ini mulai dilaksanakan pada Januari 2025 sampai Mei 2025, memiliki tujuan untuk menganalisis



kolaborasi yang dilakukan antar aktor dalam pengembangan Taman Balekambang sebagai objek wisata terbuka hijau. Pendekatan yang dipilih adalah studi kasus untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat serta mengkajinya melalui latar belakang, kondisi dan interaksi yang terjadi mengenai kolaborasi yang dilakukan pada proses pengembangan Taman Balekambang pasca revitalisasi. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu, sampel dipilih karena dianggap mempunyai wawasan yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat membantu peneliti dalam memahami objek atau fenomena sosial yang dikaji (Sugiyono, 2016). Dalam pemilihan informan terdapat karakteristik yang harus dipenuhi (Kepala Tata Usaha UPTD Kawasan Wisata, UMKM, sanggar seni, dan masyarakat) agar memahami informasi mengenai proses pengembangan dan relasi yang terlibat dalam pengembangan Taman Balekambang.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer atau data yang didapatkan secara langsung dari sumber penelitian adalah dengan wawancara dan observasi, selain itu data sekunder diperoleh melalui informasi yang tersedia di akun sosial media, berita internet dan website Pemerintah Kota Surakarta. Uji validitas data menggunakan *triangulasi* dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber informasi. Analisis data menggunakan serangkaian proses berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Bogdan & Biklen, 1982) dalam (Moleong, 2013). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fungsionalisme Struktural dengan skema AGIL milik Talcott Parsons untuk menjelaskan data yang diperoleh sehingga proses kolaborasi dapat tersaji dengan baik.

Hasil dan Pembahasan

Tabel 1. Pembagian tugas dalam kolaborasi pengembangan Taman Balekambang

No	Aktor yang terlibat	Peran
1	Pemerintah Kota Solo	Menerima usulan dan menindaklanjuti revitalisasinTamn Balekambang
2	UPTD Kawasn Wisata	Mengusulkan revitaliasi, mengelola, membentuk kolaborasi dengan aktor lain.
3	Kementerian PUPR	Memberikan dana hibah Kementerian untuk revitalisasi sebesar 171 miliar rupiah
4	Sanggar tari	Mementaskan pertunjukan tari, melestarikan budaya dan menarik minat wisatawan.
5	UMKM	Menarik wisatawan dan menyediakan wisata kuliner
6	Masyarakat sekitar	Mengelola ticket, keamanan, dan kebersihan
7	Masyarakat umum (wisatawan)	Melakukan promosi baik secara langsung maupun melalui media sosial

Sumber: Data Primer

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Taman Balekambang sebagai ruang terbuka hijau dan destinasi wisata di Kota Solo melibatkan berbagai aktor sosial. Hal ini sesuai dengan teori sosial fungsionalisme struktural yang peneliti



gunakan dalam menganalisis hasil temuan penelitian ini. Teori ini menjelaskan dalam sebuah sistem sosial setiap elemen memiliki spesialisasi peran yang berbeda sehingga diperlukan kerja sama agar berbagai peran tersebut dapat berjalan koheren untuk mencapai tujuan bersama. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa setiap aktor memiliki perannya masing-masing, tetapi mereka diakomodir dengan satu tujuan bersama agar dapat berproses secara beriringan. Proses tersebut sangat penting mengingat teori sosial ini juga menjelaskan bahwa difungsi pada salah satu elemen dapat memberikan dampak bagi elemen lain sehingga menghambat ketercapaian tujuan.

Kolaborasi dengan Pemerintah

Dalam pengembangan pasca revitalisasi menjadi objek wisata terbuka hijau, pemerintah memberikan upaya yang maksimal. Sebelumnya UPTD Kawasan Wisata mengajukan untuk revitalisasi kepada Bapak Walikota yang saat itu menjawab yaitu Bapak Gibran dan kemudian direspon secara positif. Tindak lanjut dilakukan oleh Kementerian PUPR dengan survei ke lokasi dan memberikan dana hibah Kementerian untuk revitalisasi sebesar 171 miliar rupiah.

Pemerintah merupakan aktor yang mendukung dan mengupayakan pengembangan Taman Balekambang untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan membangun kolaborasi bersama aktor-aktor lain yang memiliki sumber daya yang memadai. UPTD Kawasan Wisata yang dinaungi langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berkontribusi dalam wewenang seperti membuat regulasi dan peraturan yang diberlakukan di Taman Balekambang untuk berbagai pihak. Regulasi ini terkait dengan penetapan biaya tiket masuk yaitu sebesar Rp 5000 yang ditetapkan sejak pembukaan Taman Balekambang pasca revitalisasi dan peraturan-peraturan yang

diberlakukan baik kepada masyarakat umum maupun dengan aktor yang terlibat dalam kolaborasi.

Peraturan ini berupa beberapa himbauan untuk menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban. Peraturan tersebut diantaranya adalah larangan membuang sampah sembarangan dan merusak fasilitas seperti menginjak rumput, himbauan untuk melakukan reservasi apabila ingin mempergunakan fasilitas tertentu, larangan menggoreng dan membakar untuk UMKM, dan biaya retribusi yang dikenakan bagi pengunjung yang melakukan foto menggunakan kamera profesional sebesar Rp 200.000. Pemerintah kota juga memberi support untuk dana pemeliharaan berupa alat-alat kebersihan dan kelistrikan.

Taman Balekambang merupakan kawasan milik Pemerintah Kota Surakarta dan sudah sejak lama menjadi lokasi yang digunakan untuk melakukan pentas budaya seperti Sendratari Ramayana, ketoprak, dan wayang orang. Untuk itu, pemerintah juga memberikan fasilitas bagi pegiat seni berupa tempat pentas *indoor* dan *outdoor* yang lebih bagus dan lebih memadai dari pada sebelum diberlakukan revitalisasi. Selain itu hal ini juga untuk mempertahankan identitas Taman Balekambang sebagai Taman Budaya.

Kolaborasi dengan Sanggar Seni

Sebagai Taman yang memegang peranan penting dalam pelestarian budaya dan kesenian, Taman Balekambang menyediakan ruang bagi pegiat seni yang ada di Kota Surakarta untuk ikut meramaikan dan menarik minat wisatawan. Sanggar Pincuk adalah sanggar tari tradisional pertama yang berkolaborasi dan melakukan pentas di Taman Balekambang sejak awal sanggar ini dibentuk yaitu sekitar tahun 2008. Sanggar ini juga menjadi pelopor bagi sanggar-sanggar lain untuk ikut berkolaborasi meramaikan Taman Balekambang dengan mengadakan pentas Sendratari Ramayana.



Pasca revitalisasi, sanggar-sanggar tari yang ada di Kota Surakarta semakin dilibatkan untuk pengembangan. Sebanyak tigabelas sanggar tari yang ada di seluruh Kota Surakarta diberikan kesempatan satu kali setiap tahun untuk berkontribusi mementaskan Sendratari Ramayana dan menjadi ikon budaya Taman Balekambang. Lokasi teater yang dibuat lebih megah dari sebelum revitalisasi menambah nilai estetika dari pertunjukan Sendratari Ramayana. Taman Balekambang juga mengambil juri dari ISI dan budayawan untuk menyeleksi sanggar-sanggar yang sudah layak untuk melakukan pemetasan di Taman Balekambang namun tetap menjalin kolaborasi dengan sanggar-sanggar yang memang sudah sejak lama bergabung di Taman Balekambang.

Kolaborasi dengan UMKM

Dalam berkolaborasi dengan UMKM, Taman Balekambang memprioritaskan bagi UMKM yang memiliki KTP berdomisili Kota Surakarta. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat UMKM terkhusus di Kota Surakarta. Setiap bulan, UPTD Kawasan Wisata Taman Balekambang akan membuka pendaftaran bagi UMKM yang ada di Kota Surakarta untuk berjualan di dalam Kawasan Taman Balekambang. Pendaftaran ini dikenakan biaya sewa *stand* yang berkisar 2-3 juta rupiah/bulan. Koordinasi juga dilakukan dengan UMKM yang mendaftar ketika pengambilan kupon undian untuk mendapatkan nomor urutan *stand* yang menjadi lokasi untuk berjualan. Koordinasi biasanya berupa himbuan dan arahan mengenai peraturan yang harus diikuti para UMKM ketika berjualan. UPTD Kawasan Wisata yang mengelola Taman Balekambang memberikan peraturan bahwa pedagang yang berjualan di *stand* dilarang keras untuk melakukan kegiatan memasak seperti menggoreng dan membakar, hal ini dikhawatirkan limbah dari minyak maupun asap akan mengotori kawasan Taman Balekambang. Selain *stan* UMKM yang tidak

permanen dan hanya berjualan ketika hari sabtu, minggu dan tanggal merah, terdapat pula bangunan permanen sejumlah delapan *unit* untuk UMKM berjualan setiap hari, namun harga sewanya juga tentu berbeda dengan UMKM yang menyewa *stan* dari tenda. *Tenant* UMKM tersebut berada tepat di gedung gastronomi, UMKM yang ada di *tenant* permanen diperbolehkan untuk menggoreng karena sudah difasilitasi tempat untuk memasak dan mencuci.

Tujuan dari adanya kolaborasi antara Taman Balekambang dengan UMKM tentunya untuk meningkatkan taraf perekonomian mereka. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta PP No. 13 Tahun 2013 mengenai pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. Berdasarkan hal tersebut maka UPTD Kawasan Wisata memberikan ruang untuk membedayakan UMKM di Taman Balekambang. Selain itu dengan dilibatkannya UMKM dalam pengembangan Taman Balekambang adalah agar meramaikan dan menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Selain itu, wisatawan yang berkunjung tidak hanya sekedar jalan-jalan saja, namun juga bisa berwisata kuliner.

Kolaborasi dengan Masyarakat

UPTD Kawasan Wisata merangkul masyarakat sekitar dalam pengembangan Taman Balekambang. Untuk melakukan pengelolaan dan merawat Taman Balekambang, pihak UPTD Kawasan Wisata mempekerjakan masyarakat yang berada di sekitar Taman Balekambang, bahkan saat ini kenaikan jumlah tenaga kerja dari masyarakat yang dipekerjakan mencapai 40%. Masyarakat yang dipekerjakan, akan ditempatkan pada penjagaan tiket masuk, pengelolaan parkir, bagian kebersihan dan keamanan. Selain itu, turut serta mengajak masyarakat luas yang berwisata untuk ramai-ramai mempromosikan Taman Balekambang



melalui sosial media sebagai destinasi wisata yang memiliki keunikan karena menggabungkan unsur budaya dan alam.

Dari berbagai macam kolaborasi yang terjadi antara aktor-aktor tersebut, terlihat bahwa Taman Balekambang dalam pengembangannya mampu merangkul banyak pihak dan melakukan sinergi. Pada dasarnya Taman Balekambang tetap tidak bisa berdiri sendiri sebagai sebuah objek wisata, tidak bisa hanya pemerintah yang mengelola, namun tetap dibutuhkan kerjasama dan gotong royong untuk terus melakukan pengembangan. Pemerintah membutuhkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengelola dan merawat Taman Balekambang, masyarakat sekitar juga dilibatkan dalam pengelolaan sehingga membuka lapangan kerja. Sanggar tari difasilitasi tempat untuk melakukan pementasan sehingga kegiatan budaya akan terus melekat dengan Taman Balekambang. Pedagang UMKM diberi wadah untuk berjualan dan menyediakan wisata kuliner bagi wisatawan, masyarakat yang berwisata juga dapat berkunjung menikmati fasilitas yang memadai untuk melakukan berbagai macam aktivitas sosial. Hasil akhirnya semua aktor akan saling membutuhkan satu sama lain sehingga roda perekonomian dapat terus berputar.

Temuan di atas selanjutnya dianalisis menggunakan teori struktural fungsional. Melalui teori ini, peneliti dapat melihat kolaborasi antar aktor dan perannya masing-masing. Ketidaktepatan aktor dalam menjalankan perannya akan memberikan dampak bagi keberjalanan peran aktor lain sehingga dapat menghambat ketercapaian tujuan.

Adaptasi merupakan tahap awal di mana sistem-sistem sosial diharuskan untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri untuk menghadapi lingkungannya untuk mencapai

suatu tujuan (Mulyana & Siby, 2020). Revitalisasi Taman Balekambang di dasari karena Taman Balekambang hanya difungsikan sebagai hutan kota dan tempat peristirahatan saja. Untuk itu maka upaya revitalisasi dilakukan untuk menambah nilai fungsi dari Taman Balekambang dan saat ini mengalami sedikit peralihan fungsi sebagai Taman Kota dan Objek Wisata. Untuk itu pihak pengelola yaitu UPTD Kawasan Wisata menyesuaikan diri kembali dengan kondisi wajah baru Taman Balekambang sebagai objek wisata terbuka hijau dan mengkolaborasikannya dengan aktor-aktor yang memiliki sumber daya memadai. Pelaksanaan adaptasi ini dilakukan dengan mengkomunikasikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan dari sebelum dilakukan revitalisasi sampai sesudah dilakukan revitalisasi. Dengan adanya komunikasi maka kolaborasi yang efektif antar aktor dapat terjalin, hal ini berdampak pada terlaksananya upaya pengembangan taman dengan baik.

Tahap kedua dalam fungsional struktural Talcott Parsons adalah pencapaian tujuan, pada tahap ini sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Secara berkesinambungan sistem akan mengambil hal-hal yang diserap oleh adaptasi, kemudian oleh goal diambil dan di manage sehingga tujuan dapat tercapai (Nurchaya, 2021). Revitalisasi Taman Balekambang bertujuan untuk merubah fungsi yang awalnya hanya sebagai Hutan Kota, menjadi Taman Kota sekaligus objek wisata. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota.

Implementasi dari pencapaian tujuan ini adalah terbentuknya objek wisata yang memadukan keasrian alam dengan budaya. Masyarakat tetap dapat menikmati taman kota yang lebih luas dan menikmati fasilitas yang memadai. Masyarakat dikenakan biaya Rp 5000, namun dengan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat, Taman Balekambang dapat dikelola dengan baik agar dapat terus dinikmati



oleh masyarakat. Pencapaian tujuan yang kedua adalah meningkatkan PAD kota. Pengembangan objek wisata secara optimal mampu menjadi salah satu cara dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi (Akbar et al., 2022). Upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melibatkan berbagai aktor untuk meramaikan Taman Balekambang, mulai dari UMKM sebagai destinasi kuliner, sanggar tari sebagai ikon budaya Taman Balekambang, masyarakat sekitar dipekerjakan di Taman Balekambang dan masyarakat luas untuk melakukan promosi lewat media sosial. Upaya tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tentunya meningkatkan PAD kota karena ramai wisatawan.

Tahap ketiga dalam Fungsional Struktural Talcott Parsons adalah integrasi yaitu sebuah sistem terdapat hubungan yang mengatur setiap bagiannya serta menjaga sistem sosial agar tatanannya seimbang (Aprilia & Juniarti, 2022). Untuk menjaga sistem sosial diperlukan adanya nilai-nilai tertentu yang seperti norma dan aturan (Turama, 2020). Setiap hari senin, pengelola menutup Taman Balekambang guna melakukan perbaikan dan memperlirahatkan taman agar ekosistem di dalamnya tetap terjaga. Selain itu koordinasi dengan sanggar seni maupun UMKM juga dilakukan secara berkala guna menampung keluhan, melakukan evaluasi, dan menemukan solusi.

Tahap yang terakhir adalah latensi yaitu pemeliharaan pola dan nilai (Mulyana et al., 2023). Dalam pemeliharaan pola antara aktor-aktor terdapat unsur berupa pengelola (UPTD Kawasan Wisata), sanggar seni, UMKM dan masyarakat. Semua unsur tersebut berkolaborasi berkoordinasi secara aktif, forum-forum juga disediakan agar hubungan antar aktor tetap terjalin dengan baik dan meminimalisir konflik. Komunikasi dan koordinasi yang dijaga dengan baik inilah yang akan menghasilkan suatu sistem sosial yang

harmonis. Hubungan baik tersebut harus tetap dijaga hingga menjadi sebuah kultur, yang mana nanti seterusnya para aktor tersebut bisa bisa saling memberi masukan dan saran dan nantinya mampu menumbuhkan rasa optimisme para aktor terkait untuk tetap terlibat aktif dan harmonis dalam pengembangan Taman Balekambang sebagai objek wisata terbuka hijau.

Dari berbagai macam kolaborasi yang terjadi antara aktor-aktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa Taman Balekambang dalam pengembangannya mampu merangkul banyak pihak dan melakukan sinergi. Pada dasarnya Taman Balekambang tetap tidak bisa berdiri sendiri sebagai sebuah objek wisata, tidak bisa hanya pemerintah yang mengelola, namun tetap dibutuhkan kerjasama dan gotong royong untuk terus melakukan pengembangan. Pemerintah membutuhkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengelola dan merawat Taman Balekambang, masyarakat sekitar juga dilibatkan dalam pengelolaan sehingga membuka lapangan kerja. Sanggar tari difasilitasi tempat untuk melakukan pementasan sehingga kegiatan budaya akan terus melekat dengan Taman Balekambang. Pedagang UMKM diberi wadah untuk berjualan dan menyediakan wisata kuliner bagi wisatawan, masyarakat yang berwisata juga dapat berkunjung menikmati fasilitas yang memadai untuk melakukan berbagai macam aktivitas sosial. Hasil akhirnya semua aktor akan saling membutuhkan satu sama lain sehingga roda perekonomian dapat terus berputar.

Kesimpulan

Kawasan Balekambang sebelumnya adalah milik pribadi keluarga Keluarga Keraton Mangkunegaran, seiring berjalannya waktu, sudah mulai tidak terawat dan akhirnya berpindah kepemilikan menjadi milik Pemerintah Kota Surakarta. Kawasan ini mulai direvitalisasi menjadi hutan kota



sejak tahun 2007 dan revitalisasi yang terakhir dilakukan pada tahun 2022 dengan sedikit mengubah fungsi hutan kota menjadi taman kota dan objek wisata. Pasca revitalisasi, upaya pengembangan dilakukan dengan melibatkan beberapa aktor yang memiliki sumber daya seperti pemerintah, sanggar seni, UMKM, dan Masyarakat, namun Taman Balekambang belum bekolaborasi dengan pihak swasta. Kolaborasi yang dilakukan dengan aktif dan saling bersinergi antar aktor-aktor terkait menjadi kunci utama keberhasilan pengembangan objek wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang terjalin antar aktor yang terlibat mampu mengoptimalkan potensi Taman Balekambang sebagai objek wisata terbuka hijau, namun tantangan seperti promosi yang belum maksimal dan belum ada keterlibatan kolaborasi dari pihak swasta diharapkan mampu diperhatikan lagi kedepannya agar proses pengembangan Taman Balekambang sebagai objek wisata terbuka hijau lebih optimal.

Daftar Pustaka

- Akbar, R., Supriyono, B., & Domai, T. (2022). Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Gubugklakah Kabupaten Malang. *Administrasi Publik, Jurnal* 8(2), Ilmiah 170–177. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.008.02.5>
- Amelia, E. O., Pramono, J., & Suhita, D. (2022). Strategi Dinas Pariwisata dalam pengembangan pariwisata Kota Surakarta di masa pandemi Covid-19. *Ilmu Administrasi Publik (JIAP)*, 7(1), 2022.
- Aprilia, S., & Juniarti, U. (2022). Implementasi Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons Dalam Upaya Melestarikan Tradisi Islam Melayu Nganggung Dulang di Bangka Belitung. *DIALOKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 01(01), 18–37.
- Ashartono, R., Hayatri, M. A. S., Amirrulloh, A., & Kesuma, W. P. (2024). REVITALISASI TAMAN BALEKAMBANG: LANGKAH MENUJU PARIWISATA BERKELANJUTAN DI SURAKARTA. *Pringgitan*, 5(1), 31-37. <http://dx.doi.org/10.47256/prg.v5i1.549>
- Asurah, W., & Wibawani, S. (2023). COLLABORATIVE GOVERNANCE PENGEMBANGAN OBJEK WISATA AIR EMBUNG “BANDUNG BONDOWOSO” KABUPATEN BOJONEGORO. *Jurnal Darma Agung*, 31(3), 167-177. <https://doi:10.46930/ojsuda.v31i3.3206>
- BPS, Kota Surakarta Dalam Angka. Surakarta: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2024
- Christina Nur Wijayanti, & Stevani Andhika Sekar Rani. (2022). STRATEGI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DALAM REBRANDING KAWASAN WISATA TAMAN BALEKAMBANG. *Nawasena: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 1(3), 10–19. <https://doi.org/10.56910/nawasena.v1i3.368>
- Mulyana, M., & Siby, E. (2020). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGELOLA OBYEK WISATA PANTAI HARLEM DI KAMPUNG TABLASUPA OLEH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN JAYAPURA. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 5(2), 127-151. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v5i2.1266>
- Mulyana, M., Wicaksono, L., Junanto, T., & Millah, R. (2023). Kompetensi Penulisan Karya Ilmiah Guru Dalam Perspektif Agil. *Manajemen Pendidikan*, 18(2), 84-98.



- <https://doi.org/10.23917/jmp.v18i2.23283>
 Nurcahya, A. (2021). Konsep Dan Penyesuaian Diri Perempuan Dalam Pernikahan Perjuduhan: Adaptation, Goal Attainment, Integration, and Latency. *Ristekdik: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 6(1), 7.
- Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Purnawati, L. (2021). PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) DAN PENGEMBANGAN WISATA DI PANTAI GEMAH. *Publiciana*, 14(02), 293-206.
<https://doi.org/10.36563/publiciana.v14i02.372>
- Ritzer, G., & Stepnisky, J. (2018). Sociological Saniati, S., Assuja, M. A., Neneng, N., Puspaningrum, A. S., & Sari, D. R. (2022). Implementasi E-Tourism sebagai Upaya Peningkatan Kegiatan Promosi Pariwisata. *International Journal of Community Service Learning*, 6(2), 203–212.
<https://doi.org/10.23887/ijcsl.v6i2.45559>
- Sitorus, N. I. B. (2020). Peran dan kolaborasi stakeholder pariwisata dalam mendukung peningkatan kunjungan wisata di Kawasan Danau Toba. *Jurnal Hospitality Dan Pariwisata*, 6(2).
<http://dx.doi.org/10.30813/jhp.v6i2.2416>
- Sugiyono. (2016). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D (23rd ed.). ALFABETA.
- Veriyani, V., Parahita, B. N., & Trinugraha, Y. H. (2023). Kolaborasi Stakeholders Dalam Pengembangan Ruang Publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 242.
<http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v14i2.8278>

